



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

SURAT PERNYATAAN STATUS HUKUM ARSIP

Pada hari ini Jumat, 10 November 2023 bertempat di Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropati No.2, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Taufik Hanafik, MUP
Jabatan : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

Dengan ini menyatakan bahwa **Arsip Dewan Perancang Nasional dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1958-1969** adalah milik Kementerian PPN/Bappenas dan berada di bawah pengawasan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Daftar arsip terlampir pada surat ini.

Surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Sekretaris Kementerian PPN/*anf.*
Sekretaris Utama Bappenas



Dr. Ir. Taufik Hanafik, MUP

LAMPIRAN DAFTAR ARSIP
DEWAN PERANCANG NASIONAL DAN POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA 1958-1969

No.	No. Inventaris	Uraian Ringkas	Periode	Jumlah	Keterangan
1.	E6514	<p>Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun 1961-1969 berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku I : Pokok-Pokok Pembangunan Nasional Semesta-Berencana 2. Buku II : Rantangan Bidang Pokok Proyek Pembangunan Nasional-Semesta Berencana 3. Buku III : Bidang Mental/Ruhani dan Penelitian 4. Buku IV : Bidang Kesejahteraan, Pemerintahan Dan Keamanan/Pertahanan 5. Buku V : Bidang Produksi 6. Buku VI : Bidang Distribusi 7. Buku VII : Bidang Keuangan 8. Buku VIII : Uraian Menteri-menteri <p>Kedelapan buku dibagi menjadi 17 jilid, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jilid I : Pendahuluan b. Jilid II : Sosialisme Indonesia, Tripola Pembangunan, Pola Proyek c. Jilid III : Garis Besar Pembangunan: Pola Pembangunan, Pelaksanaan dan Penutup d. Jilid IV : Pola Penjelasan Bidang: Kemasyarakatan, Ekonomi/Keuangan, Sandang/Pangan, Bidang Pokok Proyek pembangunan e. Jilid V : Kebudayaan dan Pendidikan f. Jilid VI : Pendidikan g. Jilid VII : Pendidikan Tenaga Pembangunan h. Jilid VIII : Penelitian i. Jilid IX : Penelitian j. Jilid X : Penelitian k. Jilid XI : Kesejahteraan Rakyat l. Jilid XII : Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan m. Jilid XIII : Pangan dan Sandang n. Jilid XIV : Industri, Termasuk Obat-obatan o. Jilid XV : Distribusi, Komunikasi dan Turisme p. Jilid XVI : Keuangan q. Jilid XVII : Uraian Menteri-Menteri, Lampiran 	1960	1	Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun 1961-1969 terdiri dari jilid 1-17 seluruhnya dalam bentuk tekstual dengan jenis akses bersifat terbuka untuk umum dan sudah dialih media dalam bentuk digital di laman https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/dokumen/ebe53a4d-46d4-4e0b-884b-4962f51b9415
2.	1301	<p>Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun Pertama 1961-1969 berisi Proyek-proyek yang dibagi dua golongan yaitu: golongan A dan golongan B dan penyebarannya dari Sabang sampai Merauke sesuai karakteristik daerah dan potensinya. 335 Proyek A dan 8 Proyek B dipersiapkan dengan biaya Rp 240 miliar. Golongan A adalah proyek pembangunan yang diberi huruf pengenal dan nomor. AA AB, dsb dan disusun menurut 8 bidang pembangunan, yaitu:</p>	1960	1	Pembangunan Semesta jaitu Pelaksanaan 335 Proyek A dan 8 Proyek B Pembangunan Semesta Nasional Berencana seluruhnya dalam bentuk tekstual dengan jenis akses bersifat terbuka untuk umum

No.	No. Inventaris	Uraian Ringkas	Periode	Jumlah	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mental dan rohani. 2. Penelitian. 3. Kesejahteraan. 4. Pemerintahan. 5. Keamanan/Pertahanan. 6. Produksi. 7. Distribusi. 8. Keuangan. <p>Golongan B adalah proyek untuk membiayai pembangunan dan proyek diberi huruf pengenal: B1, B2, B3, dsb.</p>			<p>dan sudah dialih media dalam bentuk digital di laman https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/dokumen/d94f4fd8-5046-4500-93ac-c6797c68d0ad</p>
3.	646012	<p>Surat Keputusan Menteri/Ketua Dewan Perantjng Nasional RI No. 018/UP/Dep/1962 tentang Pembentukan Panitia Statistik dikeluarkan Depernas untuk memenuhi kebutuhan akan data-data lapangan pada saat penyusunan dan pelaksanaan PPN SB Tahap Pertama 1961-1969. Panitia Statistik, terdiri dari Ketua, Anggota, Sekretaris, serta tugas dan fungsinya. Panitia Bidang Statistik memberikan data-data kepada Depernas dalam guna menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dan selaras serta berdasarkan bukti-bukti yang kuat akan realitas di lapangan.</p>	1962	1	<p>Surat Keputusan Menteri/Ketua Dewan Perantjng Nasional RI No. 018/UP/Dep/1962 tentang Pembentukan Panitia Statistik seluruhnya dalam bentuk tekstual dengan jenis akses bersifat terbuka untuk umum dan sudah dialih media dalam bentuk digital di laman https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/peraturan/d60ca2c3-f5c2-44d5-b050-27e37de26c71</p>
4.	646540	<p>Peraturan-Peraturan Negara Tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi berisi beberapa aturan diantaranya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang ekspor b. Peraturan Presiden No. 6 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang impor c. Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang impor dan ekspor d. Peraturan Presiden No. 20 tahun 1963 tentang Kebidjaksanaan dibidang harga e. Peraturan Presiden No. 7 tahun 1963 tentang Aktivitas Perusahaan Dagang Negara dalam rangka Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi f. Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1963 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Prp tahun 1959 dan penjabutan Undang-undang No. 32 Prp tahun 1960 dan Undang-undang No. 34 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1959 No. 91, L.N. tahun 1960 No. 92 dan L.N. tahun 1960 No. 94) g. Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963 tentang Kenaikan tundjangan kemahalan umum menurut P.G.P.N. 1961 	1963	1	<p>Dokumen Tekstual Peraturan-Peraturan Negara Tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi seluruhnya dalam bentuk tekstual dengan jenis akses bersifat terbuka untuk umum dan sudah dialih media dalam bentuk digital di laman https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/peraturan/49aa2589-220c-47f9-9967-cdb9625447c4</p>

No.	No. Inventaris	Uraian Ringkas	Periode	Jumlah	Keterangan
		<p>h. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan-penghasilan/penghasilan-peralihan kepada bekas Pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian Negara serta denda dan anak jatim/piatunja</p> <p>i. Peraturan Presiden No. 21 tahun 1963 tentang Perubahan angka presentasi tundingan kemahalan umum, tundingan perusahaan dan tundingan perusahaan tambahan menurut Peraturan Pokok Gadjji Perusahaan Negara</p> <p>j. Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 tentang Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi Pegawai Negeri</p> <p>k. Instruksi Presiden RI No. 2 tahun 1963 tentang Koordinasi garis Kebidjaksanaan Dalam Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi</p> <p>l. Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 1963</p> <p>m. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral No. 8/63 Kep/MUBS/G</p> <p>n. Peraturan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan RI tentang Prosedur dan Pembebanan Pengimporan Barang Penumpang dan Barang Kiriman No. 1/Dekon/WMP-Keu/1963</p>	1964	1	Peraturan - Peraturan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) seluruhnya dalam bentuk tekstual dengan jenis akses bersifat terbuka untuk umum dan sudah dialih media dalam bentuk digital di laman https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-libratv/peraturan/d9aa6f07-ea3d-4fe4-9c79-9885489574ba
5.	646546	Berisi kumpulan-kumpulan proses bisnis penyusunan dokumen perencanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, penetapan panitia-panitia bidang dan tata kerja Depemas, dan berbagai peraturan yang dibuat untuk mensukseskan program pelaksanaan pola pembangunan nasional semesta berencana serta evaluasinya.	1966	1	Dokumen Tekstual Memorandum tentang Badang Perentjanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No. 173/Mupp/VI/III/66. - tahun 1966 seluruhnya dalam bentuk tekstual dengan jenis akses bersifat terbuka untuk umum dan sudah dialih media dalam bentuk digital di laman https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-libratv/peraturan/5c64531d-5e7a-4161-86f9-2d08149df537
6.	646028	Memorandum berisi seputar pembentukan Bappenas dilengkapi dengan tugas rutin dan tugas khusus. Pemerintah memutuskan mencabut Undang-Undang No. 80 Tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 144; Tambahan Lembaran-Negara No. 1675); Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 79), dan Peraturan-peraturan lain yang bertahap dengan kedua Peraturan Negara tersebut serta menetapkan Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 31 Desember 1963. Dewan Perancang Nasional (termasuk Badan Kerja Depemas) diintegrasikan ke dalam Kabinet Kerja dan dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat Bappenas.	1960	1	Penyelenggaraan Pembangunan Semesta Dalam Rangka Mendjalankan UUD Pasal 33
7.	1314	Pidato Ketua Depernas Prof. Mr Muhammad Yamin dengan judul Penyelenggaraan pembangunan semesta dalam rangka menjalakan UUD pasal 33, Kongres Nasional SOBSI III, 25 Agustus 1960 di Surabaya., yang betisi:			

No.	No. Inventaris	Uraian Ringkas	Periode	Jumlah	Keterangan
8.	1300	<p>Pendahuluan.</p> <p>I. Jenis perusahaan pembangunan.</p> <p>II. Perusahaan-negara (government enterprise dan private enterprise).</p> <p>III. Bahan Rakjat dan Hutang Negara.</p> <p>IV. Pendapatan Nasional dan Penduduk.</p> <p>V. Sosialisme Indonesia.</p> <p>VI. Pembangunan Satu Windu: 1961-1969.</p> <p>VII. Pembangunan Semesta bernilai 240 miliar rupiah.</p> <p>VIII. Pembiayaan Pembangunan Semesta dengan kekayaan alam dan pinjaman long term credit atas keuntungan kedua belah pihak.</p> <p>IX. Pengerahan Tenaga Rakjat.</p> <p>Penutup.</p>	1961	1	<p>seluruhnya dalam bentuk tekstual dengan jenis akses bersifat terbuka untuk umum dan sudah dialih media dalam bentuk digital di laman https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/dokumen/153dce21-e47a-4ef2-985c-13f95b7b28b0</p>
9.	1305	<p>Kumpulan rencana-rencana proyek pembangunan nasional yang dilakukan pada fase pertama pembangunan dari tahun 1961-1969 pada 8 bidang pembangunan nasional, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mental/Ruhani 2. Kebudayaan 3. Pendidikan 4. Penelitian 5. Kesejahteraan Sosial 6. Pemerintahan 7. Produksi 8. Pangan 9. Sandang 10. Industri 11. Obat-obatan 12. Distribusi 13. Pembiayaan (termasuk Pariwisata) <p>Dokumen berisi laporan peninjauan Produksi Sektor Perobatan Depernas ke Daerah Bogor pada September-Oktober 1962, berisi:</p> <p>Surat Pengantar Halaman</p> <p>Pendahuluan</p> <p>Bab I : Peninjauan umum</p> <p>Bab II : Proyek – proyek (P.N Nurani Farma; P.N Nakula Farma; P.N Radja Farma ; PT. ETHICA; N.V SOHO ; PT. DUPA; Lembaga Farmakoterapi)</p> <p>Bab III : Kesimpulan</p> <p>Bab IV : Saran</p>	1962	1	<p><i>List of Project National Overall Development Plan 1961 – 1969</i></p> <p>seluruhnya dalam bentuk tekstual dengan jenis akses bersifat terbuka untuk umum dan sudah dialih media dalam bentuk digital di laman https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/dokumen/338d1f99-55f2-4785-9dbb-78315b72ddc4</p>
9.	1305	<p>Dokumen berisi laporan peninjauan Produksi Sektor Perobatan Depernas ke Daerah Bogor pada September-Oktober 1962, berisi:</p> <p>Surat Pengantar Halaman</p> <p>Pendahuluan</p> <p>Bab I : Peninjauan umum</p> <p>Bab II : Proyek – proyek (P.N Nurani Farma; P.N Nakula Farma; P.N Radja Farma ; PT. ETHICA; N.V SOHO ; PT. DUPA; Lembaga Farmakoterapi)</p> <p>Bab III : Kesimpulan</p> <p>Bab IV : Saran</p>	1962	1	<p>Laporan Peninjauan Depernas Bulan September dan Oktober 1962 Bidang Produksi Ke Daerah Djakarta dan Bogor Padi Sentra / Djabar seluruhnya dalam bentuk tekstual dengan jenis akses bersifat terbuka untuk umum dan sudah dialih media dalam bentuk digital di laman https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/dokumen/1641074c-1c75-4094-afb1-c97c9b6197f5</p>

No.	No. Inventaris	Uraian Ringkas	Periode	Jumlah	Keterangan
10.	1306	<p>Laporan kerja Dewan Perantjng Nasional untuk daerah Maluku pada 25 September 1962. Peninjauan untuk memperoleh bahan perencanaan, pengawasan, dan penilaian pembangunan nasional semesta berencana. Terdiri dari 5 bagian, yaitu:</p> <p>Bab I Pendahuluan Bab II Proyek-proyek Bab III Kesimpulan Bab IV Saran-saran Lampiran-lampiran</p>	1962	1	<p>Laporan Peninjauan Depemas Bulan September dan Oktober 1962 Bidang Kemasarakatan Ke Daerah Maluku seluruhnya dalam bentuk tekstual dengan jenis akses bersifat terbuka untuk umum dan sudah dialih media dalam bentuk digital di laman https://berpustakaan.bappenas.go.id/e-library/dokumen/c39307b9-93c8-459f-857f-e1f16c14b6ac</p>